

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Peran**

Istilah peran kerap didengar dan diucapkan banyak orang. Seringkali kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:854) mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang diberi atau mendapat suatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut.

Pengertian peran menurut Fauzi (2013:3) adalah sebuah kegiatan yang dilakukan karena adanya sebuah keharusan maupun tuntutan dalam sebuah profesi atau berkaitan dengan keadaan dan kenyataan. Jadi peran merupakan perilaku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang yang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. Jadi peran di pengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.

#### **B. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

##### **1. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat penting dalam pembentukan watak dan karakter peserta didik untuk menjadi

pribadi yang bermoral baik serta memiliki karakter dan watak yang baik pula. Sama halnya menurut Soedijarto dalam Darmadi (2013:2) yang menegaskan bahwa :

PPKn untuk melahirkan warga Negara Indonesia yang berkualitas baik dalam disiplin sosial dan nasional, dalam etos kerja, dalam produktifitas kerja, dalam kemampuan intelektual dan profesioanal, dalam tanggungjawab kemasyarakatan, kebangsaan, kemanusiaan serta dalm moral, karakter dan kepribadian.

Menurut paparan diatas dinyatakan bahwa fokus dan target utama dari pembelajaran PPKn adalah melahirkan warga Negara yang berkualitas, bertanggung jawab dalam kemasyarakatan, kebangsaan, kemanusiaan serta dalam moral, karekter dan kepribadian.

Sesuai dengan namanya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang mempunyai misi sebagai pendidikan nilai dan moral Pancasila, penyadaran akan norma dan konstitusi UUD 1945, pengembangan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan penghayatan terhadap filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dimaksudkan sebagai upaya membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat BhinnekaTunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan untuk jenjang SMP/MTs, yang dirancang untuk

menghasilkan siswa yang memiliki keimanan dan akhlak mulia sebagaimana diarahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila sehingga dapat berperan sebagai warga negara yang efektif dan bertanggung jawab. Pembahasannya secara utuh mencakup empat pilar kebangsaan yang terkait satu sama lain, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti dalam Nugroho (2014:2) :

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di tingkat persekolahan bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik (*to be smart dan good citizen*) berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Warga negara yang dimaksud adalah warga negara yang menguasai pengetahuan (*knowledge*), sikap dan nilai (*attitudes and values*), keterampilan (*skills*) yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air sebagai wujud implementasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ditekankan untuk membentuk peserta didik yang memiliki karakter baik, mampu bersikap dan berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai moral dan norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan turut serta membantu peserta didik dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya di sekolah, keluarga maupun di lingkungan masyarakat luas.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dewasa ini dirancang berbasis aktivitas terkait dengan sejumlah materi yang diharapkan dapat membentuk kepribadian baik pada diri peserta didik.

Oleh karena itu, dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ditekankan kepada pembentukan sikap dan tindakan nyata yang harus mampu dilakukan oleh peserta didik. Hal ini juga ditegaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (dalam Nugroho, 2014:iii) bahwa :

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dirancang berbasis aktivitas terkait dengan sejumlah tema kewarganegaraan yang diharapkan dapat mendorong siswa menjadi warga negara yang baik melalui kepeduliannya terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi masyarakat sekitarnya. Kepedulian tersebut ditunjukkan dalam bentuk partisipasi aktif dalam pengembangan komunitas yang terkait dengan dirinya. Kompetensi yang dihasilkan bukan lagi terbatas pada kajian pengetahuan dan keterampilan penyajian hasil kajiannya dalam bentuk karya tulis, tetapi lebih ditekankan kepada pembentukan sikap dan tindakan nyata yang harus mampu dilakukan oleh tiap siswa. Dengan demikian akan terbentuk sikap yang cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20 menyebutkan “Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar”. Pembelajaran di sekolah merupakan pendidikan formal yang mempelajari berbagai mata pelajaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan, dan salah satunya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak hanya tergantung pada kemampuan guru dalam mengembangkan kompetensi dan materi pembelajaran saja, namun juga di dukung oleh penggunaan metode dan media yang tepat. Dalam proses pembelajaran peserta didik memerlukan suatu pergaulan dengan individu lain, karena itu

perlu proses pembelajaran yang lancar, harapannya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat mencerminkan hubungan perilaku yang baik antar sesama manusia.

## 2. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan nasional berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Secara umum tujuan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Permendikbud nomor 58) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (1) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic commitment and civic rresponsibility*); (2) pengetahuan kewarganegaraan; (3) ketrampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*).

### 3. Ruang Lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Ruang Lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Permendikbud nomor 58), dijelaskan tentang ruang lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa
- b. UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk Negara Republik Indonesia
- d. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan yang melandasi dan mewarnai keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Dengan demikian PPKn lebih memiliki kedudukan dan fungsi sebagai berikut:

- a. PPKn merupakan pendidikan nilai, moral/karakter, dan kewarganegaraan khas Indonesia yang tidak sama sebangun dengan *civic education* di USA, *citizenship education* di UK, *talimatul muwatanah* di negara-negara Timur Tengah, *education civicas* di Amerika Latin.
- b. PPKn sebagai wahana pendidikan nilai, moral/karakter Pancasila dan pengembangan kapasitas psikososial kewarganegaraan Indonesia sangat koheren (runtut dan terpadu) dengan komitmen pengembangan

watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dan perwujudan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UU No.20 Tahun 2003.

#### 4. Komponen Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendapat dari Hamruni (2011:11) pembelajaran merupakan suatu sistem intruksional yang mengacu pada seperangkat komponen yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan. Sebagai sebuah sistem pembelajaran meliputi suatu komponen, antara lain tujuan, bahan, peserta didik, guru, metode, situasi dan evaluasi. Agar tujuan itu tercapai semua komponen yang ada harus diorganisasikan sehingga antar sesama komponen terjadi kerjasama. Oleh karena itu guru tidak boleh hanya memperhatikan komponen-komponen tertentu.

Sebagai sebuah sistem, masing-masing komponen tersebut membentuk sebuah integritas atau satu kesatuan yang utuh. Masing-masing komponen saling *berinteraksi*, yaitu saling berhubungan secara aktif dan saling mempengaruhi. Komponen pembelajaran tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

##### a. Tujuan

Tujuan pendidikan sendiri adalah untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dengan kata lain, pendidikan



merupakan peran sentral dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia.(Rusman, 2013:42)

b. Sumber belajar

Sumber belajar, diartikan sebagai bentuk atau segala sesuatu yang ada di luar diri seseorang yang bias digunakan untuk membuat atau memudahkan terjadinya prose belajar pada diri sendiri atau peserta didik, apa pun bentuknya, apa pun bendanya, asal bias digunakan untuk memudahkan proses belajar, maka benda itu bias dikatakan sebagai sumber belajar.(Rusman, 2013:42)

c. Strategi pembelajaran

Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. (Hamruni, 2011:2)

d. Pendekatan

Pendekatan (*approac*) dalam pembelajaran menurut Sanjaya dalam Hamruni (2011:6) dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk pada pandangan tentang terjadinya proses yang sifatnya masih sangat umum.

e. Model

Soekamto dalam Hamruni (2011:6) mengemukakan maksud dari model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar



untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh eggen dan kauchak bahwa model pembelajaran memberikan kerangka dan arah bagi guru untuk mengajar.

f. Teknik

Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan oleh orang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode, yaitu cara yang harus dilakukan agar metode yang dilakukan berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, sebelum seseorang ceramah maka harus memperhatikan situasi dan kondisi. Hamruni (2011:8). Teknik dan taktik pembelajaran merupakan penjabaran dari dari metode pembelajaran.

g. Taktik

Taktik pembelajran adalah gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Taktik sifatnya lebih individual. Misalnya ada dua orang yang sama-sama ceramah dalam situasi yang sama bisa dipastikan melakukan cara yang berbeda. (Hamruni, 2011:8)

h. Metode

Menurut Faturahman (2011:32) metode merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam

kegiatan belajar mengajar, metode sangat diperlukan oleh guru, dengan penggunaan yang bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

i. Media pembelajaran

Media pembelajaran, merupakan salah satu alat untuk mempertinggi proses interaksi guru dengan siswa dan interaksi siswa dengan lingkungan dan sebagai alat bantu mengajar dapat menunjang penggunaan metode mengajar yang digunakan oleh guru dalam proses belajar. (Rusman, 2013:42)

j. Evaluasi pembelajaran

Evaluasi, merupakan alat indicator untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Evaluasi bukan hanya sekedar menilai suatu aktivitas secara spontan dan incidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai secara terencana, sistematis dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. (Rusman, 2013:42)

Komponen pembelajaran adalah penentu dari keberhasilan proses pembelajaran, komponen-komponen tersebut memiliki fungsi masing-masing setiap perannya dalam proses pembelajaran.

5. Karakteristik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Bertolak dari berbagai kajian secara filosofis, sosiologis, yuridis dan pedagogis, mata pelajaran PPKn dalam kurikulum 2013, secara utuh memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Nama mata pelajaran yang semula Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) telah diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn);
- b. Mata pelajaran PPKn berfungsi sebagai mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter;
- c. Kompetensi Dasar (KD) PPKn dalam bingkai kompetensi inti (KI) yang secara psikologis-pedagogis menjadi pengintergrasi kompetensi peserta didik secara utuh dan koheren dengan penanaman, pengembangan, dan/atau penguatan nilai dan moral Pancasila; nilai dan norma UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika; serta wawasan dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Pendekatan *pembelajaran berbasis proses keilmuan (scientific approach)* yang dipersyaratkan dalam kurikulum 2013 memusatkan perhatian padaproses pembangunan pengetahuan (KI-3, keterampilan (KI-4), sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) melalui transformasi pengalaman empirik dan pemaknaan konseptual. Pendekatan tersebut memiliki langkah generik sebagai berikut:
  - 1) Mengamati (*observing*),
  - 2) Menanya (*question*),
  - 3) Mengumpulkan informasi (*exploring*),
  - 4) Menalar/mengasosiasi (*associating*),
  - 5) Mengkomunikasikan (*communicating*).

Pada setiap langkah dapat diterapkan model pembelajaran yang lebih spesifik, misalnya:

- 1) untuk mengamati antara lain dapat menggunakan model menyimak dengan penuh perhatian;
- 2) untuk menanya antara lain dapat menggunakan model bertanya dialektis/mendalam;
- 3) untuk mengumpulkan informasi antara lain dapat menggunakan kajian dokumen historis;
- 4) untuk menalar/mengasosiasi antara lain dapat menggunakan model diskusi peristiwa publik; untuk mengomunikasikan antara lain dapat menggunakan model presentasi gagasan di depan publik (*public hearing*).

Dalam konteks lain, misalnya model yang diterapkan berupa model project seperti Proyek Belajar Kewarganegaraan yang menuntut aktivitas yang kompleks waktu dan panjang dan kompetensi yang lebih luas kelima langkah generik diatas dapat diterapkan secara adaptif pada model tersebut.

- e. Model pembelajaran dikembangkan sesuai dengan karakteristik PPKn secara holistik/utuh dalam rangka peningkatan kualitas belajar dan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik sebagai warganegara yang cerdas dan baik secara utuh dalam proses pembelajaran otentik (*authentic instructional and authentic learning*) dalam bingkai integrasi Kompetensi Inti sikap, pengetahuan,

dan keterampilan. Serta model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik bersikap dan berpikir ilmiah (scientific) yaitu pembelajaran yang mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran.

- f. Model Penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar PPKn menggunakan penilaian otentik (*authentic assesment*). Penilaian otentik mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. Penilaian otentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam pengaturan yang lebih otentik.

## **B. Kenakalan Remaja**

### **1. Pengertian Remaja**

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa dengan ditandai dengan perubahan jasmaniah pada diri mereka, yang bilamana terjadi ketidak seimbangan pada diri dan tubuh mereka dapat mempengaruhi pada perkembangan mentalnya.

Dalam ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lain yang terkait (seperti biologi dan ilmu faal) remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik, yaitu masa alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya.

WHO pada tahun 1974 memberikan definisi remaja yang lebih bersifat konseptual. Remaja adalah suatu di masa di mana:

- a. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.
- b. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa.
- c. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.

Remaja dalam arti *adolescence* (Inggris) berasal dari kata latin *adolescere* yang artinya tumbuh kearah kematangan. Kematangan disini tidak hanya berarti kematangan fisik, tetapi terutama kematangan sosial-psikologis. Remaja dalam arti psikologis sangat berkaitan dengan kehidupan dan keadaan masyarakat di mana masa remajanya sangat panjang dan ada yang hampr-hampir tidak ada sama sekali.

## 2. Kenakalan Remaja

Kehidupan remaja sangat dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya. Apabila remaja hidupnya dalam lingkungan yang buruk maupun dalam kondisi keluarga yang buruk hal tersebut bisa menjadikan remaja tersebut memiliki kepribadian yang buruk juga, begitu sebaliknya apabila remaja

hidup dalam lingkungan yang baik hal tersebut bisa menjadikan remaja menjadi pribadi yang baik.

Kenakalan remaja di masa sekarang ini sudah semakin membahayakan. Masyarakat kita saat ini sudah nakal. Pelaksanaan hukum seringkali tidak dipatuhi, bahkan cenderung diakali. Pada masyarakat yang nakal, mungkin kenakalan dianggap baik-baik saja, sehingga perlu ditentukan definisi atau pengertian yang dapat membatasi kekacauan istilah, sehingga perbedaan pendapat mengenai kenakalan tidak terlalu jauh.

Akhir-akhir ini banyak terjadi tindak kenakalan remaja, dimana remaja melakukan perilaku yang menyimpang dari kebiasaan atau melanggar hukum. Seperti yang diungkapkan Dr. Kusumanto dalam Willis (2014:89):

*Juvenile delinquency* atau kenakalan anak dan remaja ialah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai acceptable dan baik oleh suatu lingkungan atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan.

Secara sosiologis menurut Dr. Fuad Hassan dalam Willis (2014:89) kenakalan remaja ialah 'kelakuan atau perbuatan anti sosial dan anti normatif'. Mengenai masalah kenakalan remaja dewasa ini sudah menjadi program pemerintah untuk menanggulangnya. Hal ini sudah terbukti sejak tahun 1971 Pemerintah telah menaruh perhatian yang serius dengan dikeluarkannya Bakolak Inpres No. 6/1971 Pedoman 8 tentang Pola



Penanggulangan Kenakalan Remaja. Dalam Willis (2014:88) pedoman itu diungkapkan mengenai pengertian kenakalan remaja sebagai berikut:

kenakalan remaja ialah kelainan tingkah laku, perbuatan atau tindakan remaja yang bersifat asosial bahkan anti sosial yang melanggar norma-norma sosial, agama serta ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Jensen dalam Sarwono (2011:256) membagi kenakalan remaja ini menjadi empat jenis yaitu :

- a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan dan lain-lain.
- b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasaan dal lain-lain.
- c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain : pelacuran, penyalahgunaan obat. Di indonesia mungkin dapat juga dimasukkan hubungan seks sebelum menikah dalam jenis ini
- d. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah atau membantah perintah mereka dan sebagainya.

Untuk mengembalikan anak-anak yang nakal kepada budi pekerti yang baik atau kepada kelakuakn yang sehat, (Daradjat, 1986:121) tidaklah mungkin dengan menghukumnya dengan hukuman-hukuman seperti penjara, hukuman badan, dipukul, disiksa dan sebagainya. Karena hukuman tersebut hanya akan mempunyai pengaruh dalam waktu yang singkat saja. Memang hukuman-hukuman itu dapat menahan/

menghentikan kelakuan-kelakuan terlarang selama hukuman itu mengancam. Setelah itu ia akan kembali kepada kelakuan-kelakuan yang tidak baik, apabila ketegangan perasaannya itu tidak diselesaikan.

Hal ini sangat penting, karena apabila menyimpang pada norma-norma yang ada akan sangat berperan pada penerimaan sosial dari lingkungannya.

### 3. Sebab-Sebab Terjadinya Kenakalan Remaja

Di dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang khususnya oleh remaja di sekolah pasti terdapat sebab musababnya mengapa remaja tersebut melakukan hal tersebut, baik disebabkan oleh faktor intern maupun dari ekstren.

Sebab-sebab terjadinya kenakalan remaja menurut Willis (2014:92) dapat diklasifikasikan dalam :

- a. Faktor-faktor yang ada di dalam diri anak sendiri
  - 1) Predisposing faktor
  - 2) Lemahnya ketahanan diri
  - 3) Kurangnya kemampuan penyesuaian diri
  - 4) Kurangnya dasar-dasar keimanan di dalam diri remaja
- b. Penyebab kenakalan yang berasal dari lingkungan keluarga
  - 1) Anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian orang tua
  - 2) Lemahnya keadaan ekonomi orang tua di desa-desa, telah menyebabkan tidak mampu mencukupi kebutuhan anak-anaknya

- 3) Kehidupan keluarga yang tidak harmonis
- c. Penyebab kenakalan remaja yang berasal dari lingkungan masyarakat
- 1) Kurangnya pelaksanaan ajaran-ajaran agama secara konsekuen
  - 2) Masyarakat yang kurang memperoleh pendidikan
  - 3) Kurangnya pengawasan terhadap remaja
  - 4) Pengaruh norma-norma baru dari luar
- d. Pengaruh kenakalan yang bersumber dari sekolah
- 1) Faktor guru
  - 2) Faktor fasilitas sekolah
  - 3) Norma-norma pendidika dan kekompakan guru
  - 4) Kekurangan guru

Selain dari itu, senada dengan pernyataan diatas, Daradjat (1986:113) mengemukakan faktor yang menyebabkan timbulnya kenakalan remaja sebagai berikut:

- a. Faktor kurangnya pendidikan agama.
- b. Faktor kurangnya pengertian orang tua tentang pendidikan.
- c. Faktor kurang teraturnya pengisian waktu.
- d. Faktor kurang stabilnya keadaan sosial, ekonomi dan politik.
- e. Faktor terjadinya kemerosotan moral dan mental orang dewasa.
- f. Faktor banyaknya film dan buku-buku bacaan yang tidak baik.
- g. Faktor pendidikan dalam sekolah yang kurang baik.
- h. Faktor perhatian masyarakat terhadap pendidikan anak-anak.

### C. Hasil Penelitian yang Relevan

- a. Tasman Malusa (2010) dengan judul penelitian Hubungan Lingkungan Sekolah dalam Pembelajaran PPKn dengan Kenakalan Remaja di Sekolah. Penelitian ini bertempat di SMP Negeri 1 Lamala Kab. Banggai Sulawesi Tengah. Hasil penelitian ini secara umum yaitu lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Lamala Kab. Banggai Sulawesi Tengah termasuk dalam kategori baik, dalam arti sudah menunjang untuk terlaksananya aktivitas belajar mengajar dengan baik. Lingkungan sekolah yang baik dapat mengatasi kenakalan remaja di sekolah. Kenakalan yang terjadi di sekolah masih dapat diatasi pihak sekolah dengan cara memberikan teguran dan hukuman agar siswa tidak lagi mengulangi perbuatan salahnya. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa hubungan lingkungan sekolah di kalangan sekolah SMP Negeri 1 Lamala Kab. Banggai Sulawesi Tengah dengan kenakalan remaja di sekolahnya dapatlah ditanggulangi pihak sekolah.
- b. Nina Unun Yulista (2011) dengan judul Upaya Sekolah dalam Menanggulangi Kenakalan Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Panji Kabupaten Situbondo. Secara umum penelitian ini memperoleh hasil bahwa bentuk kenakalan siswa di SMP Negeri 1 Panji Kabupaten Situbondo yaitu pelanggaran terhadap peraturan tata tertib sekolah, pelanggaran terhadap kegiatan belajar, pelanggaran terhadap ketentraman sekolah dan pelanggaran terhadap etika pergaulan dengan warga sekolah. Kenakalan siswa pada dasarnya disebabkan atau

ditimbulkan oleh dua factor utama yaitu factor internal pada diri siswa itu sendiri dan factor eksternal dalam hal ini factor lingkungan keluarga serta lingkungan sosial. Upaya yang dilakukan sekolah berbasis karakter pada aspek pembinaan dan pencegahan kenakalan siswa. Secara teknis pelaksanaan program sekolah berbasis karakter ini dikordinir dan dievaluasi oleh guru PKn sekolah yang bersangkutan.



#### D. Kerangka Berpikir

Berikut ini merupakan kerangka pikir pada penelitian Peran Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Menangani Kenakalan Remaja SMP PGRI Sumbang.

Gambar. 2.1 Kerangka Berpikir

